BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* (Studi pada KPP Pratama Bandung Karees).

2.1.1 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian kualitas informasi

Menurut Ikin Solikin (2010:2) mengatakan pengertian Informasi adalah:

"Informasi adalah data yang signifikan yang telah diolah menjadi suatu bentuk dan mempunyai arti bagi pihak yang menerima serta memberikan manfaat dalam pembuatan keputusan saat sekarang maupun saat yang akan datang.Informasi ini akan digunakan sebagai dasar bertindak atau membuat keputusan menyelesaikan permasalahan dan akan dapat mengurangi ketidakpastian yang sering menghambat dan mencapai suatu tujuan".

Menurut Muchtar (2010:6) mengatakan pengertian informasi adalah :

"Informasi adalah hasil suatu proses yang terorganisasi, memiliki arti dan berguna bagi orang yang menerimanya".

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Muchtar (2010:10) menjelaskan beberapa karakteristik yang di perlukan agar informasi dapat berarti dan berguna :

1. *Reliable*
   Informasi harus bebas dari kesalahan dan akurat dalam mempresentasikan suatu kegiatan dari suatu organisasi.

2. *Relevant*
   Informasi yang relevan harus memberika kepastian kepada pemakai atau informasi yang dibutuhkan.

3. *Timely*
   Informasi yang disajikan tepat pada saat yang dibutuhkan/ tepat waktu dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

4. *Complete*
   Informasi yang disajikan lengkap termasuk semua data yang relevan dan tidak mengabaikan unsur kepentingan yang diharapkan oleh pembuat keputusan.

5. *Understandable*
   Informasi yang dibutuhkan hendaknya dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti oleh pembuat keputusan.

Pengertian Kualitas Informasi menurut Maman Suherman dan Dini Suryani Putri (2008:467) adalah :

"Kualitas informasi yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yang diyakini mempertinggi kegunaan informasi akuntansi".

Menurut Hilton, et al (2000:551) menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi tiga karakteristik sebagai berikut :

Three characteristics of information determine its usefulness for decision making:

1. *Relevance. Information is relevance if it is pertinent to a decision problem.*
2. *Accuracy. Information that is pertinent to a decision problem must also be accurate.*
3. *Timeliness. Relevant and accurate data are valuable only if they are timely, that is available in time a for a descision.*

2.1.1.2 Pengertian akuntansi keuangan

Menurut Sri Dewi Anggadini dan Ely Suhayati (2008:1) yang mengutip *America Accounting Association* (AAA), dalam *Pengantar Akuntansi I* definisi akuntansi adalah:

"Proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut".

Menurut Sri Dewi Anggadini dan Ely Suhayati (2008:1) yang mengutip *Accounting Principles Board* (APB), dalam *Pengantar Akuntansi I* definisi akuntansi adalah :

"Aktivitas jasa fungsinya dalah menyediakan informasi kuantitas, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada".

Menurut Wilopo (2005:9) yang mengutip *American Accounting Association* (AAA) definisi akuntansi keuangan adalah :

"Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran,pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan".

Proses kegiatan akuntansi meliputi :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemprosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai pelaporan.

2.1.1.3 Pengertian kualitas informasi akuntansi keuangan

Menurut Maman Suherman dan Dinni Suryani Putri (2008:467) Eldon S.hendriksen dan Michael F Van Breda mengungkapkan pengertian kualitas informasi akuntansi keuangan adalah :

"Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri informasi akuntansi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka informasi tersebut harus berkualitas".

Menurut Maman Suherman dan Dinni Suryani Putri (2008:467) mengutip Eldon S.hendriksen dan Michael F Van Breda menjelaskan pengertian kualitas informasi akuntansi keuangan adalah:

"Kualitas informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan tersebut efektif dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi efektif harus mengacu kepada standar yang ada yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dari Pernyataan Standar akuntansi Keuangan".

2.1.1.4 Karakteristik kualitatif dalam informasi akuntansi keuangan

Tujuan dasar dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna. Ini merupakan tujuan yang sangat rumit karena adanya alternatif pelaporan. Untuk membantu pemilihan di antara berbagai alternatif akuntansi keuangan dan pelaporan, kerangka kerja konseptual mengidentifikasi karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi yang berguna. Menurut Stice and Skousen (2007:30) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar, karakteristik utama yang dibahas adalah :

1. Relevansi
   adalah nformasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Mendefinisikan relevansi sebagai membuat suatu perbedaan. Aspek dari informasi relevan adalah :
   a. Nilai umpan balik (*feedback value*)
      adalah dari kejadian masa lalu membantu dalam mengkonfirmasi atau memperbaiki perkiraan sebelumnya,informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan masa yang akan datang.
   b. Nilai prediksi (*predictive value*)
      adalah membantu pengguna memprediksi hasil dari kejadian masa lalu, saat ini dan masa depan.
   c. Tepat waktu (*timeliness*)
      adalah aspek yang terpenting agar informasi dapat"membuat suatu perbedaan"karena apabila informasi baru bisa didapat setelah keputusan diambil, tidak banyak digunakan.

2. Keandalan
   adalah Informasi dikatakan dapat diandalkan apabila secara relatif bebas dari kesalahan dan penyajian hal yang seharusnya. Keandalan (*reliability*) tidak berarti ketepatan yang absolut. Informasi yang berdasarkan penilaian dan yang menggunakan estimasi dan perkiraan tidak mungkin akurat secara total, tetapi harus diandalkan. Tujuannya adalah memberikan jenis informasi yang dapat memberikan kepercayaan bagi pemakainya. Informasi seperti ini harus memiliki kriteria sebagai berikut :
   a. Dapat diverifikasi
      adalah substansi mengungguli bentuk kehati-hatian (dimana ada ketidakpastian, kesalahan dalam menyediakn informasi dan menjamin adanya konservatisme.
   b. Penyajian jujur
      adalah Informasi yang disajikan harus mencatat semua transaksi dan peristiwa lainnya secara jujur.
   c. Netralitas
      adalah informasi untuk kebutuhan umum.

3. Dapat dibandingkan (*comparability*)
   adalah bahwa informasi menjadi lebih berguna ketika dapat dikaitkan dengan suatu tolak ukur atau standar. Perbandingan dapat dilakukan dengan data dari perusahaan lain atau informasi yang sejenis dengan perusahaan yang sama, tetapi pada periode yang berbeda.

4. Dapat dipahami
   adalah kualitas penting Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami.

Karakteristik dari informasi adalah informasi tersebut pada umumnya harus akurat,relevan,tepat waktu dan lengkap agar informasi tersebut dapat berguna dan memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan.

Penjelasan lebih lanjut dalam pasal 3 ayat 7 bahwa Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah suatu satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009 KUP : wajib pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar,lengkap dan jelas dan menandatanganinya.

2.1.1.5 Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor

Menurut Stice dan Skousen (2007:32) yang diterjemahkan Ali Akbar,kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

a) Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.
b) Tepat pada waktunya, berarti informasi yang diterima tidak boleh terlambat.
c) Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat dari pemakainya.

2.1.1.6 Indikator kualitas informasi akuntansi keuangan

Menurut Ari Brasmasto (2010) yang mengutip Standar Akuntansi Keuangan (2002 :7),indikator kualitas informasi akuntansi keuangan terdiri atas :

1. Dapat dipahami
   adalah kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami.

2. Relevan
   adalah informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masalalu.

3. Keandalan
   adalah informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan
   adalah pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

2.1.2 Perilaku Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Perilaku Wajib pajak

Menurut Notoatmodjo(2003:154) perilaku adalah :

"Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa,bekerja,kuliah,menulis, membaca dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar".

Menurut Notoatmodjo (2003: 155), mengemukan bahwa :

"Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon".

2.1.2.2 Ciri-ciri sikap/perilaku

Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu menurut Marselius (2002:142) adalah sikap mempunyai beberapa ciri, yaitu :

a. Sikap tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya.
b. Sikap selalu berhubungan dengan obyek yang dipersepsikan oleh individu.
c. Sikap melibatkan perasaan dan motivasi.
d. Sikap dapat berlangsung sebentar, tetapi dapat juga menetap tergantung kuat tidaknya keyakinan seseorang terhadap obyek sikap tersebut.

2.1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian menurut Bilson Simamora (2004:6) adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi, seperti tabel 2.1 ini :

Tabel 2.1
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Kebudayaan	Sosial	Pribadi	Psikologi
Budaya	Kelompokreferensi	Usia dan Tahap siklus hiduppekerjaan dan	Motivasi Persepsi
Subbudaya	Keluarga	keadaan Gaya hidup	Proses belajar Keyakinan dan
Kelas sosial	Peran dan status	kepribadian	sikap

Sumber: Bilson Simamora (2004:6)

1. Faktor Kebudayaan, mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku. Peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budayanya, dan kelas sosial.
   a. Budaya
      adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, keluarga dan institusi penting lainnya.Yang termasuk dalam budaya ini adalah pergeseran budaya dan nilai-nilai dalam keluarga.
   b. Sub budaya
      adalah pola-pola kultural yang menonjol, dan merupakan bagian atau segmen dari populasi masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks.
   c. Kelas Sosial
      adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.Kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda.

2. Faktor Sosial
   Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial.
   a. Kelompok
      Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil.Kelompok yang berpengaruh langsung dan dimana seseorang menjadi anggotanya

disebut kelompok keanggotaan (kelompok referensi). Ada yang disebut dengan kelompok primer, dimana anggotanya berinteraksi secara tidak formal seperti keluarga, teman. Ada pula yang disebut dengan kelompok sekunder yaitu seseorang berinteraksi secara formal tetapi tidak reguler seperti organisasi. Kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan perbandingan atau tatap muka atau tak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Orang sering dipengaruhi oleh kelompok rujukan dimana ia tidak menjadi anggotanya. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga memengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang karena secara normal orang menginginkan untuk menyesuaikan diri.

b. Keluarga
Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Bahkan jika pembeli sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua, pengaruh terhadap perilaku pembeli tetap ada. Sedangkan pada keluarga prokreasi yaitu keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak, pengaruh pembelian itu akan sangat terasa.

c. Peran dan Status sosial
Kedudukan seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat.

3. Faktor Pribadi
Keputusan yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli,jabatan,keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri yang bersangkutan.

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup
Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia.

b. Pekerjaan
Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

c. Gaya Hidup
Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan.

d. Kepribadian
Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan memengaruhi perilaku. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri.

4. Faktor Psikologi

   Pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologi yang utama yaitu faktor motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.

   a. Motivasi

      Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Suatu kebutuhan akan berubah jadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. Motivasi adalah suatu konsep yang digunakan ketika dalam diri kita muncul keinginan dan menggerakan serta mengarahkan tingkah laku. Semakin tinggi motivasi seseorang maka semakin tinggi intensitas perilakunya.

   b. Persepsi

      Persepsi diartikan sebagai proses dimana individu memilih, merumuskan dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai sesuatu. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda dari objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi.

      1) Perhatian yang selektif

         Kecenderungan bagi manusia untuk manyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi berarti bahwa seseorang harus bekerja cukup keras untuk menarik perhatian pelanggan.

      2) Mengingat kembali yang selektif

         Menguraikan kecenderungan orang untuk meng-interprestasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini.

5. Proses Belajar *(Learning)*

   Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dorongan,rangsangan,petunjuk respon dan pembenaran. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar. Secara teori, pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan dan penguatan. Para pemasar dapat membangun permintaan akan produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat dengan menggunakan isyarat motivasi dan memberikan penguatan positif.

6. Kepercayaan dan Sikap

   Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian memengaruhi perilaku pembeli. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu.

Sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi dan proses kognitif kepada suatu aspek. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan, pendapat atau sekedar percaya. Kepercayaan inilah yang akan membentuk citra produk dan merk. Sedangkan, sikap menentukan orang untuk berperilaku serta relatif konsisten terhadap objek yang sama.

2.1.2.4 Pengertian subjek pajak dan wajib pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:188) mengatakan bahwa :

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu, yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (Subyek Pajak Penghasilan) (pasal 1 butir 2 UU KUP)".

Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu mempunyai penghasilan melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP maupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak.Subyek pajak adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak (Siti kurnia rahayu,2010 :185).

2.1.2.5 Pengertian subyek pajak orang pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:185) mengatakan bahwa:

"Orang pribadi adalah wajib pajak yang tiap tahun harus melaporkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun tersebut. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang, seandainya ada penghasilan neto yang belum dilaporkan dalam tahun sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan".

2.1.2.6 Jenis subyek pajak orang pribadi

Subyek pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu dalam negeri dan subyek pajak luar negeri Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang mengutip pasal 2 ayat 2 UU no.36 tahun 2008.

1. Subyek pajak dalam negeri
    a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
    b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
    c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subyek pajak. Selanjutnya bila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris.
2. Subyek pajak luar negeri
    a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
    b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari jalan usaha atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2.7 Pengertian perilaku wajib pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) mengatakan bahwa :

"Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya,sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak".

2.1.2.8 Indikator perilaku wajib pajak

Menurut tarjo dan Indra kusumawati (2006:109) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku
   Memahami dan mengerti tarif pajak yang berlaku sekarang ini sesuai undang-undang perpajakan agar wajib pajak bisa menghitung pajak terutangnya tanpa masih adanya kesalahan dalam menghitung maka dari itu aparat mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam pengisian SPT.
2. Pengetahuan perubahan peraturan perpajakan
   Memahami dan mengerti perubahan perundang-undangan sehingga wajib pajak melakukan sendiri perhitungan pajak terutangnya.
3. Kemampuan menghitung pajak
   Wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya.maka dari itu diberikan pelatihan dan penyuluhan oleh aparat pajak.
4. Pembuatan catatan keuangan/penghasilan
   Wajib pajak harus membuat catatan keuangan untuk bisa memudahkan dalam perhitungan pajaknya.
5. Kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak dalam perhitungan PPh
   Wajib pajak pernah melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya.

2.1.3 *Self Assessment System*

2.1.3.1 Pengertian *self assessment system*

Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan to asses yang artinya menilai,menghitung dan menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment system* merupakan salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia,dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung,membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Menurut Djuanda dan Lubis (2006:107) *self assessment system* adalah:

”Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) mengatakan bahwa :

“Self assessment system adalah suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Dengan adanya *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System*

Sebagaimana dinyatakan oleh Soemitro dalam Harahap (2004:44) bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

1. Kesadaran pajak dari wajib pajak
   Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

2. Kejujuran wajib pajak
   Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan

masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)
   Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

4. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)
   Tax Discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

Dalam *self assessment system* pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

2.1.3.3 Indikator *Self Assessment System*

Menurut jurnal tarjo & indra kusumawati (2006) yang mengutip Zain (2003:112), Indikator *self assessment system* terdiri atas :

1. Mendaftar diri
   Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) atau Kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan(KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .
2. Menghitung/Memperhitungkan
   Mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar
   Pembayaran yang dilakukan wajib pajak harus dilaksanakan tepat waktu. Jika wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *fiskus*. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau

KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

4. Melapor
   Mencantumkan pajak penghasilannya di SPT dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenernya terutang.

2.1.3.4 Prinsip *self assessment systems*

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya :

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut

surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang".

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

Self assessment system memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, sebagai upaya memberikan keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan *self assessment system* yang baik.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ari Brasmasto (2012) yang berjudul pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment* yang mengemukakan bahwa Sistem self assessment yang kita anut dewasa ini,peranan surat pemberitahuan surat tersebut lebih kurang sama dengan ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang berarti untuk tahap

pertama perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap sebagai benar. Disisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Menurut Siti Kurnia Rahayu(2010) menyatakan bahwa Dalam Pajak, sistem pencatatan tersebut lebih dikenal dengan nama pembukuan. Pembukuan yang disusun secara rapid an teratur dapat menghasilkan informasi mengenai pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan silakukan selama masa pajak (bulanan/tahun) tertentu yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya antara lain mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT masa dan tahunan, mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif Wajib Pajak jika mereka paham betul atas isi Undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan.

Selain itu, peraturan perpajakan yang baru tersebut bagi wajib pajak bisa menjadi kompleks dalam memahami peraturan perpajakan. Komplesitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak dalam peraturan yang berkorelasi positif dengan semakin tinggi kompleksitas peraturan perpajakan. Serta adanya kepastian hukum, keadilan dan kemudahan agar tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tarjo dan Indra kusumawati (2006) tentang Analisis Perilaku wajib Pajak Orang pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.

2.2.1 Keterkaitan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Sistem *Self Assesment*

Menurut Maman Suherman dan Dinni Suryani Putri (2008) yang mengutip Eldon S.hendriksen dan Michael F Van Breda (2000:131) mengatakan bahwa :

"Kualitas informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan tersebut efektif dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi efektif harus mengacu kepada standar yang ada yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dari Pernyataan Standar akuntansi Keuangan".

Untuk membantu pemilihan di antara berbagai alternatif akuntansi keuangan dan pelaporan, kerangka kerja konseptual mengidentifikasi karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi yang berguna.

Karakteristik kualitas Informasi Akuntansi keuangan Menurut Stice and Skousen (2007:29) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar, mengatakan bahwa:

"Karakteristik Kualitas Informasi keuangan utama yang dibahas adalah :

1. Relevansi

2. Keandalan
3. Dapat dibandingkan (*comparability*)
4. Dapat dipahami “.

Hubungan antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *self assessment system* diungkapan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 102) yaitu:

“ Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetor jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Menurut Ari Brasmasto (2012) yang mengutip Gunadi mengungkapkan hubungan antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *self assessment system* yaitu:

“Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas dan konsistensi. Jika unsure-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *self assessment*”.

2.2.2 Keterkaitan perilaku wajib pajak terhadap Sistem *Self Assessment*

Pengertian perilaku menurut Notoatmodjo (2003:154) adalah :

“Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) mengutip Nerre (2001:17) mengungkapkan hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* diungkapan oleh, yaitu:

“Budaya membayar pajak juga penting di perhatikan suatu negara dan hal ini

memerlukan kerjasama baik formal maupun nonformal antara instansi perpajakan dengan wajib pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik.Pelaksanaan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan diatur suatu negara pelaksanaanya yang secara historis harus di pertimbangkan juga budaya negarayang bersangkutan.Secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak.karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya,sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak".

Hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* diungkapan oleh Siti Kurnia rahayu (2010:142) yaitu:

"Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat,tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional.Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja.Disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi perilaku wajib pajak".

2.2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan daftar penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sehingga dapat membedakan keorisinalitasan penelitian ini :

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Tarjo & Indra Kusumawati (2006) JAAI Volume 10 No.1,Juni : 101-120	Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system*: suatu studi di bangkalan	Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil simpulan bahwa *self assessement system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan	1.Menggunakan Teknik statistik yang sama, yaitu menggunakan regresi. 2.Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *self assessment system.*	1.Perbedaan responden dan unit analisis 2.Menggunakan variabel independen 2 dandependen yangberbeda, yaitu *taxpayer* dan fiskus

			pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.		
2	Ari Brasmasto Vol.10,No.2	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment*	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment* . Yang berkarakter kepatuhan wajib pajak terdiri dari : mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya dan kualitas informasi akuntansi keuangan terdiri dari : benar, lengkap dan jelas secara simultan(bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem *self assessment*	1.Menggunakan Teknik statistik yang sama, yaitu menggunakan regresi berganda. 2.Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *self assessment system.*	1.Perbedaan responden dan unit analisis. 2.Menggunakan variabel independen 2 dandependen yangberbeda, yaitu kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan.
3	H.Bohari (2009) Majalah ilmiah hukum gappa No.13/tahun XI/Januari-Maret 2003	Penerapan *Self assessment* dalam sistem perpajakan nasional	Penerapan *Self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya yang bertolak dari asumsi bahwa wajib pajak jujur, dapat dipercaya dan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terhitung. Faktor yang mendukung *Self assessment* adalah pemahaman masyarakat	Menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu *self assessment system*	Perbedaan responden

			wajib pajak tentang tata cara atau prosedur perpajakan, kejujuran dan pemeriksaan.		
4	Pancawati Hardiningsih (2011) Vol.3, No.1 ISSN : 1979-4878	Faktor–Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnyapengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap wajib pajak menganggap bahwa pengeluaran yang sia-sia. Hasil ini menunjukan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.	1.Meneliti dan mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi membayar pajak. 2.Menggunakan variabel dependen yang sama .	1.Perbedaan responden dan unit analisis yaitu wajib pajak dan fiskus. 2.Menggunakan variabel independen 2 dan dependen yang berbeda. 3.Fokus penelitian diarahkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. 4. Menggunakan Teknik statistik yang berbeda, yaitu menggunakan path analisis
5	H.Maman Suherman dan Dinni Suryani Putri(2008) Vol.3, No.2 ISSN : 1907-9958	Pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap strategi peningkatan kinerja	Kualitas informasi akuntansi keuangan dengan informasi karakteristik informasi yang relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami berpengaruh signifikan terhadap strategi peningkatan kinerja yang menghasilkan informasi yang cukup berkualitas sehingga dapat	1.Menggunakan Teknik statistik yang sama, yaitu menggunakan regresi berganda. 2.Menggunakan variabel independen yang sama yaitu kualitas	Menggunakan variabel dependen yang berbeda, yaitu strategi peningkatan kinerja

			mendukung proses perbaikan untuk meningkatkan perubahan dalam organisasi.	informasi akuntansi keuangan.	
6	John Hutagaol Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, No 4, Januari 2005 : 24-25)	*Self Assessment* Implementasi & Kendalanya	Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis	Menggunakan Variabel independen yang sama, yaitu *self assessment system*	Menggunakan teknik statistik yang berbeda, yaitu regresi sederhana.
7	Ni Luh Supadmi dan wiwik andryani	Analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham. Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi memahami dan sadar pada kewajibannya, yaitu kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya.	1.Menggunakan variabel dependen yang sama,yaitu *self assessment system* 2.Menggunakan metode *purposive sampling*	Menggunakan variabel independen yang berbeda,yaitu tingkat pemahaman orang pribadi
8	Muninatus sholichah dan Istiqomah Jurnal Logos,Vol.3 No.1 Juli 2005	Perilaku wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan Di	Hasil penelitian menunjukan tingkat kesadaran pada wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan tingkat kemampuan wajib pajak berpengaruh pada keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Perubahan realisasi pajak bumi dan bangunan di	1.Menggunakan teknik statistik yaitu regresi linier berganda. 2.Variabel independennya sama yaitu, perilaku wajib pajak	Variabel dependennya berbeda yaitu, penerimaan pajak bumi dan bangunan

		Kabupaten Gresik	Kabupaten Gresik dapat di jelaskan oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kemampuan wajib pajak.		
9.	Waluyo Jurnal Akuntansi/ volume XV, No.2,mei 2011	Pengaruh Persepsi pembelajaran,motivasi dan kepribadian wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*	Hasil penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi atas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*. Hal ini menggambarkan masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang lebih berarah kepada kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Padahal dengan diberlakukannya sistem *self assessment* sangat diperlukan pemahaman pengetahuan perpajakan karena kepada wajib pajak diberikan sepenuhnya kewenangan untuk menghitung,memperhitungkan,menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Namun disadari masih banyaknya kendala dalam mengkomunikasikan informasi perpajakan dalam bahasa yang mudah dipahami wajib pajak. Fakta memang menunjukkan bahwa wajib pajak berpersepsi sulitnya memahami Undang-undang Pajak sehingga memungkinkan timbul	1.Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu,sistem *self assessment*. 2.Menggunakan teknik statistik yang sama yaitu regresi berganda.	Menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu,persepsi pembelajaran,motivasi dan kepribadian.

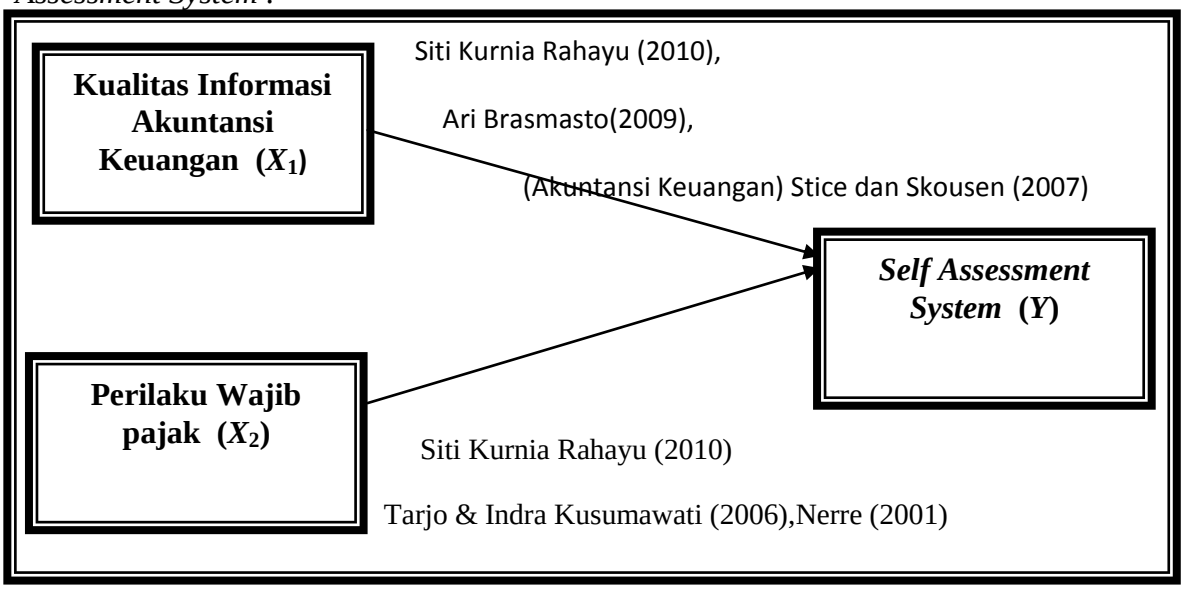
			interpretasi undang-undang yang berbeda.		
10	Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(7): 881-888, 2011 ISSN 1991-8178	*A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia*	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi dimensi kunci yang menentukan layanan kualitas dibawah sistem *self assessment* pajak yang baru. Ruang lingkup ini didasarkan pada persepsi wajib pajak orang pribadi (yang terdiri dari pemerintah karyawan, karyawan swasta dan wiraswasta pengusaha) dan agen pajak. Pertama, untuk menyelidiki apakah pedagang kecil Malaysia memahami mekanisme self-assessment sistem pajak yang baru. Kedua, kepatuhan wajib pajaknya dan pemeriksaan pajak dalam sistem *self assessment* (SAS). Hal ini menunjukan bahwa sistem *Self-Assessment* bertanggung jawab untuk memahami sistem yang baru dan untuk memenuhi aspek administrasi pajak dalam perhitungannya, pembayaran pajak, pembukuan dan catatan.	Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu *self assessment system*	Menggunakan teknik statistik yang berbeda yaitu analisis kualitatif
11	Moh Rizal Palil and Ahmad Fariq Mustapha African Journal of Business Managemen t Vol. 5(33), pp. 12864-	*Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system*	Hasil ini menunjukan bahwa pembayar pajak dengan pengetahuan yang baik dan tanggung jawab para wajib pajak berpengaruh positif terhadap *self assessment system* . Di sisi lain, wajib pajak dengan pengetahuan yang baik terhadap penghasilan dan kesadaran	Variabel dependen self assessment system	1.Menggunakan teknik statistik yang berbeda, yaitu regresi. 2.Variabel independen yang berbeda

	12872, 21 December, 2011 ISSN 1993-8233 2011 Academic Journals		pelanggaran, denda dan denda cenderung lebih baik .		

Menurut Siti Kurnia rahayu (2010:149) mengutip Bernard P.Herber Hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system*, yaitu:

"Perilaku wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan dibedakan menjadi tiga yakni *tax evasion, tax avoidance dan tax delinquency* ".

Berikut ini gambaran sederhana dari bagan di atas yaitu tentang Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Perilaku wajib pajak Terhadap *Self Assessment System* .



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya, melalui analisa data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Dengan membuat hipotesis akan dapat menjelaskan

hubungan diantara variable-variabel yang ada sehingga penelitian diharapkan dapat menentukan sumber terjadinya masalah atau memberikan gambaran tentang berbagai variabel yang mempengaruhi permasalahan yang ada.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Karees secara parsial.

H_2 : Kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Karees secara parsial.